



DKI Stop Izin Proyek Rusunami

Banyak Masalah Merugikan Warga

PERSOALAN pembangunan hunian vertikal seperti Rumah Susun Sederhana/Hak Milik (Rusunami) di Jakarta, banyak yang bermasalah. Kondisi ini menuai sorotan dari Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhamad Sanusi. Menurut Sanusi, Rusunami yang semula dimaksudkan untuk mengatasi minimnya lahan di Jakarta, ternyata di kemudian hari banyak ditemukan masalah.

"Dari 18 persen itu, kalau ditotal dari 107 rusunami di Ibu Kota, kurang lebih berarti ada 20-an unit bermasalah."

Ika Lestari Adji

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

"Program Rusunami sebenarnya bagus, namun saat ini banyak menemui masalah," ujar Sanusi, kemarin (28/4). Dia juga mengatakan, banyak warga Rusunami yang melaporkan kepada dirinya, terkait persoalan ini. Mereka mengadukan berbagai kendala yang dihadapi saat menempati rusunami.

Mulai warga sudah membayar tapi tidak dapat sertifikat, ketiadaan air bersih, fasilitas yang tidak sesuai janji dan banyak persoalan lainnya ■ **► Baca DKI... Hal 10**

"Dalam waktu dekat kami juga akan memanggil instansi terkait yang menangani masalah rusunami ini," cetusnya juga. Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan, pemanggilan instansi yang menangani masalah rusunami tersebut. Lantaran, ujarnya

juga, wakil rakyat juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. "Karena itu kami akan jalankan fungsi kami itu," paparnya juga.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji mengakui

banyaknya permasalahan yang menderita pengelolaan rusunami di Jakarta. Dia menjelaskan, 18 persen rusunami bermasalah mulai dari perizinan, pertelaahaan hingga tak adanya Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).

"Dari 18 persen itu, kalau ditotal dari 107 rusunami, kurang lebih berarti ada sekitar 20-an unit yang bermasalah. Permasalahannya sangat kompleks," katanya.

Ika mengungkapkan, saat ini rusunami yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta berjumlah 107 unit. Rusunami jenis apartemen itu milik pengembang atau pihak swasta dan bukan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Hanya 107 dari data yang ada. Itu apartemen milik pengembang, bukan punya kita," jelasnya. Menurut Ika juga, 107 rusunami yang sudah ada di Ibu Kota itu tidak bisa dibekukan

perizinannya. Sebab, sebelumnya telah ada perjanjian antara pengembang dengan pihak bank terkait cicilan atau angsuran unit rusun tersebut.

"Rusunami yang sudah ada tetap ada, karena itu kan mereka (penghuni rusun) sudah ada penjanjian dengan bank. Mereka mencicil," bebernyanya. Ika menambahkan, sesuai arahan gubernur, izin pembangunan rusunami di Jakarta sudah tidak lagi dikeluarkan. Alasannya,

rusun milik pengembang swasta itu sulit diintervensi Pemprov DKI akibat tidak adanya koordinasi dengan pengelola.

"Kebijakan Pak Gubernur memang sudah tidak ada lagi izin buat rusunami. Karena rusunami itu kan milik. Artinya saat sudah menjadi hak milik, kita tidak bisa lagi intervensi. Ke depan, kebijakannya membuat rusunawa," ungkapnyanya.

Belajar dari pengalaman itu, lanjut Ika, ke depan, Pemprov

DKI akan mengembangkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi warga miskin di Jakarta. Terlebih, subsidi yang diberikan pemerintah ke rusunami selama ini kerap salah sasaran.

"Kalau rusunami itu kadang-kadang subsidi dari pemerintah diterima orang-orang kaya. Tapi kalau di rusunawa yang kita harus jaga sekarang unit rusun tidak dijual beli atau disewa di atas sewa," tandasnya. **(wok)**